JURNALKU
Volume 6 No.3, 2026

THE INFLUENCE OF PUBLIC FINANCIAL SUPERVISION ON LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN YOGYAKARTA

PENGARUH PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DI YOGYAKARTA

Tarissa Anugrah Yulita [1]; Nasyiah 'Aaqilah Rizky Rahmania [2]; Eva Hany Fanida [3]; Revienda Anita Fitrie [4]

[1] 25040674261@mhs.unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya
[2] 25040674243@mhs.unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya
[3] evafanida@unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya
[4] reviendafitrie@unesa.ac.id, Universitas Negeri Surabaya

Abstract
Public financial oversight is an important aspect of realizing transparent and accountable governance. Local governments have a responsibility to manage regional finances effectively, efficiently, and in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to analyze the effect of public financial oversight on improving the accountability of financial management in local government in Yogyakarta. This study uses quantitative methods by collecting data in the form of local government financial reports, audit results from supervisory agencies, and data related to regional budget management. Data analysis is conducted to determine how the public financial oversight mechanism works and its impact on the level of accountability of regional financial management. The finding are expected to provide empirical evidence regarding how oversight mechanisms influence accountability, as well as to identify key supporting factors such as financial transparency, internal control systems, and audit findings. Furthermore, this study is expected to contribute to the development of better governance practices and provide practical insights for improving the quality of financial management in local governments.
Keywords*: Audit Findings; Financial Tranparency; Government Accountability; Internal Control System; Public Financial Oversight; Regional Financial Management*

Abstrak
Pengawasan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan keuangan publik dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data berupa laporan keuangan pemerintah daerah, hasil pemeriksaan Lembaga pengawas, serta data terkait pengelolaan anggaran daerah. Analisis data dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan keuangan publik serta dampaknya terhadap Tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana mekanisme pengawasan memengaruhi akuntabilitas, serta mengidentifikasi faktor pendukung seperti transparansi keuangan, sistem pengendalian internal, dan temuan audit. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam oengembangan tata kelola pemerintahan yang lebik baik serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kata Kunci: Akuntabilitas Pemerintah; Pengawasan Keuangan Publik; Pengelolaan Keuangan Daerah; System Pengendalian Internal; Temuan Audit; Transparansi Keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah untuk mendukung Pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harusa dilakasanakan secara transparan, efektif, efisien, serta dapat di pertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik menjadi prinsip utama dalam

memastikan bahwa setiap pengguna anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak hanya menekankan pada kepatuhan administratif, tetpai juga pada pencapaian kinerja yang optimaah dan berorientasi hasil (Mardiasmo,2018; Mahmudi,2016).

Dalam praktiknya, pengawasan keuangan publik memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui berbabagai mekanisme, baik pengawassan internal, maupun eksternal (Arens *et.al.*, 2017). Pengawasan internal umumnya dilakukan oleh apparat intern pemerintah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara seperti, Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan. Pengawasan yang kuat juga berfungsi sebagai alat control untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target yang telah ditetapkan (Arens *et.al.*, 2017).

Pemerintah Daerah Yogyakarta, yang tengah mengalami percepatan pembangunan, dituntut untuk menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. Tuntutan ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran publik terhadap penggunaan anggaran negara serta harapan akan adanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Dalam situasi ini, pengawasan keuangan publik menjadi mekanisme krusial untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan program yang dibiayai oleh APBD dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas tersebut juga merupakan bagian dari prinsip reformasi birokrasi yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Halim dan Kusufi, 2017).

Namun demikian, implementasi pengawasan tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Efektivitasnya sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sinergi antarlembaga pengawas, serta rendahnya kepatuhan aparatur terhadap regulasi (Mahmudi, 2016). Selain itu, konsistensi dalam tindak lanjut hasil pengawasan sangat menentukan dampak yang dihasilkan. Tanpa adanya tindak lanjut yang tegas, temuan pengawasan berisiko tidak memberikan perubahan nyata dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada proses pemeriksaan, tetapi juga memerlukan komitmen yang kuat dalam implementasi rekomendasi hasil audit secara berkelanjutan (Bastian, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis mengenai bagaimana kontribusi pengawasan keuangan publik terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan keuangan public serta kaitannya dengan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan, hasil studi ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pengawasan Keuangan Publik

Pengawasan keuangan publik merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sektor publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Mardiasmo (2018), pengawasan keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa

penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengawasan keuangan publik menjadi instrumen utama dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam menghadapi risiko penyimpangan, inefisiensi, dan penyalahgunaan anggaran.

Pengawasan keuangan publik pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan hasil, tetapi juga mencakup proses pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan memiliki dimensi yang luas, yaitu tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan sejak awal, sedangkan pengawasan korektif berfungsi untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi melalui rekomendasi hasil pemeriksaan. Dengan demikian, pengawasan keuangan publik memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan berorientasi pada perbaikan.

Lebih lanjut, Arens et al. (2017) menjelaskan bahwa dalam konteks audit sektor publik, pengawasan tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan publik memiliki cakupan yang komprehensif, yang tidak hanya menilai aspek keuangan secara kuantitatif, tetapi juga kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan keuangan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance), khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah daerah.

Teori Akuntabilitas Keuangan Daerah

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah.

Akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya diukur dari ketepatan penyajian laporan keuangan, tetapi juga dari sejauh mana informasi yang disajikan dapat dipahami, relevan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, akuntabilitas juga mencerminkan tingkat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki dimensi yang luas, yang mencakup aspek keuangan, kinerja, dan kepatuhan.

Lebih lanjut, akuntabilitas juga memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bastian, 2019). Dengan demikian, akuntabilitas keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi dan kredibilitas pemerintah di mata publik.

Teori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengawasan keuangan publik. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, baik internal maupun eksternal, akan menghasilkan temuan dan rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah temuan yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tuntas.

Tindak lanjut rekomendasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap temuan audit tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan, prosedur, maupun praktik pengelolaan keuangan. Proses tindak lanjut ini mencerminkan komitmen organisasi dalam memperbaiki kelemahan yang ada serta mencegah terjadinya kesalahan yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, tindak lanjut rekomendasi berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (organizational learning) yang berkelanjutan.

Selain itu, tingkat tindak lanjut rekomendasi juga dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kualitas sistem pengendalian internal suatu organisasi. Tingginya tingkat tindak lanjut menunjukkan bahwa organisasi memiliki sistem pengendalian yang responsif dan adaptif terhadap hasil pengawasan. Sebaliknya, rendahnya tingkat tindak lanjut menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, atau komitmen manajerial dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, tindak lanjut rekomendasi menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan publik (Mardiasmo, 2018).

Teori Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah (APBD)

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi anggaran secara efektif dan efisien. Halim dan Kusufi (2017) menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang baik ditandai dengan tingginya realisasi pendapatan, efisiensi dalam penggunaan belanja, serta tercapainya keseimbangan fiskal antara pendapatan dan pengeluaran.

Realisasi APBD tidak hanya mencerminkan aspek teknis penganggaran, tetapi juga menggambarkan kualitas kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah daerah. Tingginya realisasi pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, sedangkan efisiensi belanja mencerminkan kemampuan dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Selain itu, kondisi surplus atau defisit anggaran juga menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas keuangan daerah.

Lebih lanjut, kinerja pengelolaan keuangan daerah juga berkaitan dengan tingkat kemandirian fiskal. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, analisis terhadap kinerja APBD menjadi penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang erat antara pengawasan keuangan publik, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan publik yang efektif akan menghasilkan temuan dan rekomendasi yang berkualitas, yang selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara optimal. Tindak lanjut yang baik akan mendorong perbaikan sistem pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas pengendalian internal.

Selain itu, kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam realisasi APBD juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi. Pengawasan yang baik akan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan perencanaan, sedangkan tindak lanjut rekomendasi akan memperbaiki kelemahan yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling

memperkuat antara pengawasan, tindak lanjut, dan akuntabilitas dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Secara konseptual, hubungan antar variabel ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan publik tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tindak lanjut yang optimal. Tindak lanjut rekomendasi menjadi jembatan yang menghubungkan hasil pengawasan dengan peningkatan akuntabilitas. Oleh karena itu, integrasi antara pengawasan yang efektif dan tindak lanjut yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas pengawasan keuangan publik dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengolah data numerik secara objektif serta memberikan gambaran empiris melalui analisis statistik (Creswell dan Creswell, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari dokumen resmi, seperti laporan keuangan dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan data sekunder dinilai relevan karena data tersebut telah terverifikasi serta mencerminkan kondisi factual pengelolaan keuangan daerah (Sekaran dan Bougie, 2016).

Data tersebut dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi pengawasan keuangan publik serta tingkat akuntabilitas pemerintah daerah. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan Gambaran mengenai kinerja pengawasan keuangan serta implikasinya terhadap akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan keuangan publik menjadi salah satu instrumen krusial untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Khairi dan Meiranto (2021), efektivitas pengawasan tercermin dari kemampuannya dalam mempromosikan transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan mutu pengelolaan anggaran daerah. Di lingkungan pemerintah daerah Yogyakarta, pengawasan keuangan dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, yaitu pengawasan internal oleh aparat pengawas pemerintah serta pengawasan eksternal oleh lembaga pemeriksa negara. Oleh karena itu, sistem pengawasan berfungsi memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara teratur, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Analisis terhadap efektivitas pengawasan ini bersifat esensial guna menilai sejauh mana mekanisme yang tersedia dapat mendukung pembentukan tata Kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dari sudut pandang *New Public Management* (NPM), pengelolaan sektor publik kini tidak lagi terpaku pada prosedur administratif semata, melainkan lebih mengutamakan efisiensi, transparansi, serta pencapaian kinerja yang dapat diukur dalam pemanfaatan sumber daya publik. Penerapan prinsip tranparansi dan akuntabilitas merupakan factor utama dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Rahmawati (2021). Paradigma ini mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem pengelolaan keuangan berorientasi kinerja, sekaligus memperkokoh mekanisme pengawasan guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran secara transparan kepada masyarakat. Melalui pengawasan keuangan yang efektif, pemerintah daerah dapat menjamin bahwa seluruh program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah berlangsung selaras dengan sasaran yang direncanakan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat..

Sebagai salah satu contoh yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pengawasan keuangan publik yang dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Kualitas pengawasan keuangan publik juga memiliki pengaruh terhadap opini audit yang diberikan oleh pemerintah daerah (Wibowo, 2020). Salah satu tanda bahwa pengawasan keuangan berhasil memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah adalah pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh auditor negara terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara konsisten meraih opini WTP selama lebih dari satu dekade dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut diperoleh setelah BPK melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas sistem pengendalian internal. Pencapaian Pemerintah Daerah DIY dalam memperoleh opini WTP sebanyak 17 berturut-turut, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta efektivitas sistem pengawasan keuangan publik yang diterapkan oleh pemerintah daerah (Putra dan Dewi, 2021). Prestasi ini juga memotivasi pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu tata kelola keuangan publik serta menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Namun demikian, capaian opini WTP tidak dapat diartikan sebagai kondisi yang telah bebas tanpa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan administratif yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kelemahan pengendalian internal masih menjadi salah satu penyebab utama munculnya temuan audit pada pemerintah daerah (Hidayat, 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas sektor publik tidak hanya diukur dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Target kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 menunjukkan arah kebijakan dan fokus pengawasan keuangan publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup pemenuhan standar pemeriksaan, kesesuaian hasil pemeriksaan, hingga tingkat tindak lanjut rekomendasi, BPK menetapkan target capaian yang relatif tinggi, bahkan sebagian besar mencapai 100% (Utami, 2022). Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat dalam mendorong efektivitas pengawasan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan indikator seperti evaluasi AKIP dan pemanfaatan teknologi informasi juga menunjukkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Sasaran kegiatan, sasaran, dan anggaran		Indikator kinerja	Target
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi Rp20.837.759.000,00 • Meningkatnya pemeriksaan berkualitas Rp5.912.642.000,00	IKU 1	Pemenuhan pengendalian dari pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan	100%
	IKU 3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	75%

• Meningkatnya Layanan Pemeriksaan Rp14.925.117.000,00	IKU 4	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional	100%
	IKU 5	Tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kekuasaan	100%
	IKU 6	Tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal	100%
	IKU 7	Indeks implementasi nilai dasar BPK	Sangat memuaskan -4,81
	IKU 8	Hasil evaluasi AKIP	AA -90,06
	IKU 9	Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi	98%
	IKU 10	Tingkat penerapan manajemen pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atau kualitas komunikasi	Memuaskan -3,8
	IKU 12	Pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat kinerja anggaran	84,50%

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia – Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

Berdasarkan table 3.1 mengenai data kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat bahwa sasaran kegiatan difokuskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.837.759.000,00. Sasaran tersebut didukung oleh berbagai indikator kinerja utama (IKU) yang dirancang untuk mengukur efektivitas pengawasan keuangan publik secara komperhensif.

IKU 1 dan IKU 2 dengan target 100% menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan standar tinggi dalam kualitas pemeriksaan. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan keuangan dirancang secara ketat dan professional. Pengawasan yang berkualitas tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan akuntabilitas, karena menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah (Wibowo, 2020). IKU 3 yang menargetkan tindak lanjut rekomendasi sebesar 75% menunjukkan bahwa tidak seluruh hasil pemeriksaan dapat langsung ditindaklanjuti secara optimal. Hal ini mengindikasi masih adanya kendala dalam implementasi ditingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil pemeriksaan, tetapi juga oleh sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan secara efektif (Hidayat, 2023).

Pada IKU 4 & 6 yang pemeriksaan tematik nasional dan lokal menunjukkan bahwa pengawasan oleh badan pemeriksa keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyasar program strategis pemerintah. Hal ini mencerminkan pengawasan telah berkembang menjadi lebih substansif dan relevan, sehingga mampu mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pengawasan yang berorientasi pada program strategis dinilai mampu meningkatkan kualitas belanja publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Utami, 2022).

Selain itu, target evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat tinggi (AA) menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Nilai AKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana instansi mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan terukur. Target evaluasi AKIP dengan predikat tinggi menunjukkan adanya Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. indikator pemanfaatan teknologi dan manajemen pengetahuan menunjukkan bahwa sistem pengawasan terus dikembangkan secara modern dan terintegrasi. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mendukung keberlanjutan pengawasan keuangan publik di era digital.

Untuk memperkuat gambaran mengenai capaian akuntabilitas kinerja tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang diterapkan oleh instansi pemerintah.

Tabel 1. Hasil Evaluasi AKIP BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai (tahun)	
			2023	2024
1.	Perencanaan kerja	30,00	27,60	27,60
2.	Pengukuran kinerja	30,00	26,10	27,60
3.	Pelaporan kinerja	15,00	13,80	13,80
4.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25,00	23,00	23,00
	Total	100,00	90,50	91,40
	Predikat		AA	AA

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia – Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2024)

Berdasarkan tabel 3.2, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah **(**AKIP) pada Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan predikat AA pada tahun 2023 dan 2024. Secara kuantitatif, terdapat peningkatan nilai total dari 90,50, pada tahun 2023 menjadi 91,40 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja, meskipun tidak terjadi perubahan yang signifikan pada seluruh komponen.

Jika dianalisis lebih rinci, komponen perencanaan kinerja terjadi tetap stabil pada nilai 27,60, yang menunjukkan konsistensi dalam penyusunan rencana kerja terarah dan selaras dengan tujuan organisasi. Sementara itu, komponen pengukuran kinerja mengalami peningkatan dari 26,10 menjadi 27,60, yang mengindikasi adanya penguatan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Di sisi lain komponen pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak mengalami perubahan, masing-masing tetap pada nilai 13,80 dan 23,00. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah berada pada kategori sangat baik, masih terdapat ruang untuk inovasi, khususnya dalam peningkatan kualitas penyajian laporan dan optimalisasi evaluasi internal (Putra dan Dewi, 2021).

Dalam konteks pengawasan keuangan publik, pencapaian ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan telah berjalan secara efektif, transparan, dan terintegrasi. Penguatan pada aspek pengukuran kinerja menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga pada hasil dan dampak dari penggunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik (Sari dan Pratama, 2022).

Keberlanjutan akuntabilitas pemerintah daerah Yogyakarta tidak hanya ditentukan oleh capaian nilai AKIP yang tinggi, tetapi juga oleh kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem pengawasan,. Integrasi teknologi informasi, penguatan manajemen pengetahuan serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pengawasan keuangan publik tetap adaptif terhadap tantangan era digital. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa penguatan system pengawasan berbasis teknologi dapat meningkatkan efektivitas akuntabilitas sektor publik (Utami, 2022).

Pengawasan keuangan publik tidak hanya diukur melalui capaian akuntabilitas kinerja, tetapi juga melalui efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Realisasi APBD menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, data realisasi APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta tahun 2023–2024 disajikan pada table berikutnya sebagai dasar analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Realisasi Anggaran APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta Tahun 2023–2024

komponen	Indikator	2023	2024	Keterangan
Daerah Isimewa Yogyakarta (DIY)	Pendapatan daerah (Rp)	5,48 triliun	6,03 triliun	Meningkat, capaian >100%
	Belanja Daerah (Rp)	5,71 Triliun	5,68 Triliun	Sedikit menurun
	Realisasi Pendapatan (%)	99,75%	101,93%	Sangat efektif
	Realisasi Belanja (%)	94,87%	94,65%	Stabil (efisien)
	Surplus/Defisit (Rp)	Surplus (SiLPA Rp 293,03 Miliar)	Surplus (Rp 344,57 Miliar)	Kinerja fiskal positif
Kota Yogyakarta	Pendapatan Daerah (Rp)	2,00 Triliun	2,08 Triliun	Meningkat 4,03%
	Realisasi Pendapatan (%)	102,77%	103,42%	Sangat efektif
	Belanja Daerah (Rp)	1,97 Triliun	2,09 Triliun	Meningkat 6,04%
	Realisasi Belanja (%)	96,97%	94,07%	Sedikit menurun
	Surplus/Defisit (Rp)	+28,61 Miliar	-9,78 Miliar	Berubah menjadi deficit
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (%)	110,05%	-	Melebihi target
	Transfer Pusat (%)	96,70%	-	Hampir sesuai target

- Keterangan:
  Tanda (+) menunjukkan surplus dan (-) menunjukkan deficit

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY dan Kota Yogyakarta Tahun 2023–2024 serta laporan pertanggungjawaban APBD

Berdasarkan data table 3.3 mengenai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang pada Daerah Istimewa Yogayakarta (DIY) dan Kota Yogyakarta tahun 2023-

2024, dapat diketahui bahwa kinerja keuangan kedua daerah menunjukkan perbedaan yang siginifikan, baik dari segi efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, maupun keseimbangan fiskal.

Pada level Pemerintah Daerah Yogyakarta, realisasi pendapatan daerah mengalamai peningkatan dari s Rp5,48 triliun di 2023 menjadi Rp6,03 triliun di 2024. Angka ini melebihi target (lebih dari 100%), yang mencerminkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang efektif, terutama PAD dan alokasi dari pusat. Ini sesuai dengan catatan bahwa realisasi pendapatan DIY 2024 mencapai 101,93% dari rencana awal. Kondisi ini mencerminkan Tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Efektivitas tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2016).

Dari sisi belanja, realisasi belanja daerah DIY mengalami sedikit penurunan dari Rp5,71 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp5,68 triliun pada tahun 2024, dengan Tingkat realisasi yang relatif stabil 94,87% menjadi 94,65%. Situasi ini menggambarkan bahwa pelaksanaan belanja daerah berada dalam kategori efisien dan terkendali. Peningkatan surplus (SiLPA) ini menunjukkan kondisi fiskal yang kuat serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan, Namun, peningkatan nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran, sehingga diperlukan evaluasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran (Nordiawan, 2010).

Sementara itu, pada Pemerintah Kota Yogyakarta, realisasi pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik, meningkat dari dari Rp2,00 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,08 triliun pada tahun 2024. Tingkat realisasi pendapatan bahkan melampaui target, yaitu sebesar 102,77% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 103,42% pada tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi. Keberhasilan melampaui target tersebut juga menunjukkan efektivitas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang diterapkan oleh pemerintah kota.

Namun, peningkatan pendapatan tersebut tidak diimbangi dengan pengendalian belanja yang optimal. Realisasi belanja daerah Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan, dari dari Rp1,97 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp2,09 triliun pada tahun 2024, meskipun persentase realisasinya menurun dari 96,97% menjadi 94,07%. Ketidakseimbangan antara peningkatan pendapatan dan belanja ini menyebabkan Perubahan kondisi anggaran bergeser dari surplus Rp28,61 miliar di 2023 menjadi defisit Rp9,78 miliar di 2024. Dalam perspektif *good governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinisp efisiensi dan efektivitas belum sepenuhnya diterpakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Defisit yang terjadi mengidikasikan adanya tekanan terhadap keseimbangan fiskal yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan keuangan daerah apabila tidak dikelola dengan baik (Mahmudi, 2016).

Dengan demikian, realisasi APBD DIY dan Kota Yogyakarta tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah secara umum berada dalam kategori baik, terutama dari sisi pencapaian pendapatan. Namun, dinamika surplus dan defisit serta belum optimalnya realisasi belanja menegaskan pentingnya pengawasan keuangan publik yang efektif. Pengawasan yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan keberlanjutan fiskal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan system pengendalian internal serta evaluasi kinerja keuangan secara berkala menjadi Langkah yang strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Dalam konteks pengawasan keuangan publik, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berfungsi sebagai koreksi atas temuan audit, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara nyata. Tabel berikut menyajikan perkembangan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2021-2024 sebagai gambaran kinerja pengawasan dalam mendorong akuntabilitas yang berkelanjutan.

Tabel 3 Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan DIY

Tahun	Presentase tindak lanjut (%)
2021	85%
2022	88%
2023	90%
2024	91%

Sumber: Diolah dari Badan Pemeriksa Keuangan, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2021-2024

Berdasarkan data pada tabel tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, tingkat penyelesaian tindak lanjut di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan tren yang positif dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Persentase tindak lanjut yang berada pada kategori tinggi, yaitu di atas 80%, mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam merespons setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa tindak lanjut rekomendasi audit merupakan factor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Aisyah *et.al.*, 2024)

Peningkatan tingkat tindak lanjut dari tahun ke tahun juga menunjukkan adanya proses pembelajaran organisasi dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya memperbaiki kesalahan yang bersifat teknis, tetapi juga mulai mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan temuan audit tersebut muncul. Sejalan dengan itu, Putra dan Dewi (2021) menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK berfungsi sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa mendatang.

Lebih lanjut, tingginya tingkat tindak lanjut rekomendasi memiliki korelasi yang erat dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Pemerintah Daerah DIY dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Budianto dan Firmansyah (2025) menyatakan bahwa implementasi rekomendasi audit berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan kata lain, keberhasilan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Halim dan Kusufi, 2017; Bastian, 2019).

Namun demikian, meskipun tingkat tindak lanjut tergolong tinggi, masih terdapat sebagian kecil rekomendasi yang belum sepenuhnya diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi hasil pengawasan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas permasalahan administratif, serta kurang optimalnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, beberapa rekomendasi mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang untuk diselesaikan karena berkaitan dengan perubahan sistem, regulasi, atau kebijakan yang bersifat structural.

Dalam perspektif pengawasan keuangan publik, kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas tindak lanjut yang dilakukan. Pengawasan yang baik harus diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkenlanjutan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar diimplementasikan secara optimal (Aisyah *et.al.*, 2024).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan public memiliki peran yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini tercermin dari kualitas pemeriksaan yang tinggi, capaian indikator kinerja yang optimal, serta konsistensi dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, hasil analisis realisasi APBD menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara efektif dan relatif efisien, meskipun masih terdapat dinamika fiskal yang menunjukkan perlunya penguatan pengendalian anggaran, khususnya pada tingkat pemerintah kota.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan menjadi faktor kunci dalam memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. Tindak lanjut tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hasil audit, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan sistemik dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, efektivitas pengawasan keuangan publik tidak hanya ditentukan oleh proses pemeriksaan, tetapi juga oleh kualitas implementasi rekomendasi yang dihasilkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerh disarankan untuk memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan secara tepat waktu dan tuntas. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas akuntabilitas.

Selanjutnya, diperlukan peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses monitoring dan evaluasi tindak lanjut. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif serta memperluas objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, M. S., Amanda, A., Fakia, I., & Mariana. (2024). Evaluasi kinerja BPK dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 18–27.

Anggraeni, R. (2020). Governance digital di Indonesia: Tantangan integrasi sistem dan transformasi pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 421–436.

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services*. Pearson.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2021–2024.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024*.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Pemerintah Kota Yogyakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-17 kalinya*. https://yogyakarta.bpk.go.id/pemerintah-kota-yogyakarta-kembali-memperoleh-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp-untuk-ke-17-kalinya/

Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. BPFE.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.

Hidayat, T. (2023). Kelemahan sistem pengendalian internal dalam temuan audit pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 89–102.

Khairi, Y. D., & Meiranto, W. (2021). Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah Kabupaten Solok). *Diponegoro Journal of Accounting, 10*(4).

Mahmudi. (2016). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.

Putra, S., & Dewi, N. (2021). Hubungan opini audit dengan kualitas tata kelola keuangan daerah. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara,* 7(1), 15–28.

Rahmawati, R. (2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 200–210.

Sari, N. L. P., & Pratama, I. M. (2022). Pengaruh pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 45–60.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Wiley.

Utami, S. (2022). Penguatan indikator kinerja dalam pengawasan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 155–168.

Wibowo, A. (2020). Pengaruh kualitas pengawasan terhadap opini audit pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan,* 8(3), 567–578.